

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Jawa Tengah (2020-2023)

Novalia Salma Putri¹⁾*, Nursiam²⁾

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200201346@student.ums.ac.id¹⁾*, nur183@ums.ac.id²⁾

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure in Regencies/Cities in Central Java Province during the 2020-2023 period. A descriptive quantitative approach with purposive sampling technique was used in this study, resulting in 35 samples obtained 140 data. Data were obtained from official government sources DJPK Kemenkeu and analyzed using multiple linear regression, with classical assumption test to ensure model reliability. The results showed that PAD has a positive effect on capital expenditure, indicating that the higher the regional income, the greater the allocation of capital expenditure. Likewise, DAK has a positive impact, indicating that special funds allocated to certain sectors contribute to increasing capital expenditure. However, DAU does not have a significant effect on Capital Expenditure, indicating that general allocation funds do not directly encourage capital expenditure allocation.

Keywords: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Regional Original Income, Multiple Regression, Special Allocation Fund.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2023. Pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini, menghasilkan 35 sampel diperoleh 140 data. Data diperoleh dari sumber resmi pemerintah DJPK Kemenkeu dan di-analisis menggunakan regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan keandalan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar alokasi belanja modal. Demikian pula, DAK memiliki dampak positif, yang menunjukkan bahwa dana khusus yang dialokasikan untuk sektor tertentu berkontribusi terhadap peningkatan belanja modal. Namun, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak secara langsung mendorong alokasi belanja modal.

Kata kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Regresi Berganda, Dana Alokasi Khusus.

PENDAHULUAN

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mengelola sumber daya dan alokasi keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belanja modal, yang berkaitan langsung dengan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (djpk.kemenkeu.go.id).

Munculnya otonomi daerah merupakan respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat, di mana kekuasaan terakumulasi di tingkat nasional. Seiring waktu, sistem ini berkembang menjadi kerangka desentralisasi yang didukung oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mardiasmo (2018:11), sebagaimana dikutip dalam Diputra & Idayati (2023), menegaskan bahwa otonomi yang diberikan kepada kabupaten dan kota mencakup kewenangan yang luas, yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kemampuan keuangan masing-masing daerah sangat bervariasi, yang menyebabkan kesenjangan fiskal dan ketimpangan pembangunan daerah. Untuk mengurangi ketimpangan ini, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan otonomi serta distribusi fiskal yang adil antara pemerintah pusat dan daerah (Afriezal & Mildawati, 2023). Pemerintah pusat mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung kebutuhan keuangan daerah, dengan dua komponen utama yang memengaruhi belanja modal: Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Engylia et al., 2023). Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah harus secara cermat mengevaluasi alokasi anggaran pada setiap jenis belanja agar tetap efisien. Regulasi terkait komposisi anggaran diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) Tahun 2022, yang mewajibkan minimal 40% dari belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal (Priyono & Khotimah, 2023).

Sumber pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK), serta sumber pendapatan sah lainnya. Besarnya PAD mencerminkan kemandirian finansial suatu daerah, yang mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat serta mendorong pembangunan yang mandiri (Ursilla Lubis, 2019). Belanja modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 53, mencakup pengeluaran untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan guna mendukung kegiatan pemerintahan. Efektivitas alokasi belanja modal berpengaruh langsung terhadap optimalisasi pelayanan publik, sehingga pengelolaan sumber pendapatan daerah harus dilakukan dengan cermat (Marliana et

al., 2022). Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran, yang memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat (Trisnani & Isthika, 2022).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang berkontribusi pada kekayaan bersih daerah. PAD sangat penting dalam mendukung pengelolaan anggaran yang mandiri, tetapi banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat akibat rendahnya penerimaan PAD. Ketergantungan ini menunjukkan adanya potensi ekonomi lokal yang belum sepenuhnya digali (Hadi et al., 2022).

Meskipun PAD memiliki peran krusial dalam mendukung operasional pemerintahan dan inisiatif pembangunan, kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif rendah di banyak daerah. Penelitian oleh Rosmayanti et al. (2023) menunjukkan adanya korelasi positif antara PAD dan belanja modal, sementara Vanesha et al. (2019) berpendapat bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Demikian pula, pengaruh DAU masih diperdebatkan; Yuliani et al. (2021) menemukan hubungan positif, sedangkan Diputra & Idayati (2023) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. DAK, yang ditujukan untuk proyek infrastruktur dan layanan publik, juga menunjukkan hasil yang beragam; Priyono & Khotimah (2023) mendukung dampak positifnya terhadap belanja modal, sementara Syukri & Hinaya (2019) meragukan efektivitasnya. Dengan demikian, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah mengoptimalkan pengelolaan keuangan untuk mencegah inefisiensi anggaran dan penyalahgunaan, khususnya dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik (Rahmitasari & Asyik, 2023).

TINJAUAN LITERATUR

Teori fiskal berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Dalam pengelolaan keuangan daerah, teori ini menekankan keseimbangan anggaran, yang mengharuskan pemerintah daerah memastikan bahwa pendapatan sejalan dengan pengeluaran untuk mencegah defisit yang dapat mengganggu stabilitas fiskal dan kapasitas investasi. Selain itu, teori fiskal menyoroti kebutuhan keuangan daerah, yaitu sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik yang memadai, serta kapasitas fiskal, yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan melalui pajak dan sumber lainnya. Bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, transfer antar-pemerintah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), diperlukan untuk mendukung pembangunan yang seimbang. Stabilitas dalam penganggaran juga menjadi aspek penting, karena ketidakseimbangan fiskal dapat menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada belanja modal dan kebijakan pembangunan daerah.

Teori desentralisasi membahas redistribusi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu aspek utama dalam teori ini adalah desentralisasi fiskal, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk secara

mandiri mengelola penerimaan dan pengalokasian pengeluaran dalam kerangka regulasi nasional. Hal ini mencakup penetapan pajak daerah, penerapan retribusi, serta administrasi transfer dana seperti DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya otonomi keuangan, desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan regional. Selain itu, desentralisasi administratif memberikan otoritas yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, sehingga belanja modal dapat diarahkan secara strategis untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. Dari perspektif politik, desentralisasi mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih representatif dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tata kelola keuangan, teori keagenan mengonseptualisasikan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen untuk bertindak atas namanya. Dalam konteks keuangan daerah, pemerintah berperan sebagai prinsipal, sedangkan masyarakat berperan sebagai agen. Sejak diperkenalkannya otonomi daerah pada tahun 1999, teori keagenan menjadi dasar dalam interaksi antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan melibatkan delegasi kontraktual, di mana pemerintah daerah menerima kewenangan dari pemerintah pusat tetapi tetap bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya. Hubungan timbal balik ini mengharuskan kepatuhan terhadap regulasi nasional sekaligus memaksimalkan kesejahteraan ekonomi lokal (Zelmiyanti, 2016). Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek fundamental dalam konteks ini, karena pengelolaan keuangan yang efektif memerlukan mekanisme pelaporan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa belanja modal digunakan secara efisien demi kepentingan publik.

Pengembangan Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan penting yang memperkuat otonomi daerah, memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan layanan publik melalui alokasi belanja modal yang optimal. Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan keleluasaan keuangan yang lebih besar bagi administrasi regional, mendorong kemandirian dalam pembiayaan operasional pemerintahan, serta mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Seiring dengan meningkatnya PAD, kapasitas pemerintah daerah dalam berinvestasi pada infrastruktur publik juga semakin besar, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hadi et al., 2022). Peningkatan pendapatan daerah berkontribusi terhadap efektivitas belanja modal, yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas administrasi serta penyediaan fasilitas publik yang lebih baik (Syukri et al., 2022). Temuan empiris dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Putri et al. (2021), Nadeak & Sari (2021), Nasution et al. (2023), dan Engylia et al. (2023), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara PAD dan belanja modal. Daerah dengan alokasi PAD yang besar memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih tinggi untuk membiayai investasi pemerintah, sehingga mampu

meningkatkan kualitas infrastruktur dan transportasi publik. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah H_1 : PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Sebagaimana diungkapkan oleh Nadeak & Sari (2021), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan melalui belanja modal. Peningkatan alokasi DAU memberikan fleksibilitas anggaran yang lebih besar bagi pemerintah daerah, sehingga memungkinkan optimalisasi investasi dalam aset regional. Semakin besar DAU yang diterima, semakin luas pula cakupan pembiayaan infrastruktur publik (Nasution et al., 2023). Dana ini, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dirancang untuk memfasilitasi inisiatif pembangunan daerah dan menopang program-program publik. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Yuliani et al. (2021), Nasution et al. (2023), dan Vanesha et al. (2019), menegaskan adanya pengaruh signifikan DAU terhadap belanja modal. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang diajukan adalah H_2 : DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

Secara konseptual, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer fiskal dari pemerintah pusat yang dialokasikan secara khusus untuk membiayai proyek tertentu, terutama dalam belanja modal. Karena sifatnya yang terarah, DAK berperan penting dalam memperkuat infrastruktur dan meningkatkan penyediaan layanan publik di tingkat daerah. Peningkatan alokasi DAK meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam mendanai proyek-proyek modal. Sebaliknya, penurunan aliran DAK membatasi ruang fiskal daerah, sehingga menghambat pengembangan aset publik. Seperti yang dikemukakan oleh Nadeak & Sari (2021), DAK berfungsi sebagai penyangga keuangan bagi pemerintah daerah, karena sebagian besar biaya pembangunan diserap oleh dana ini. Penelitian empiris oleh Rosmayanti et al. (2023) serta Priyono & Khotimah (2023) memperkuat adanya korelasi kuat antara DAK dan belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah H_3 : DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi, situasi, atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, sedangkan pendekatan kuantitatif menekankan pada pengukuran dan analisis numerik, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan, hingga penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 35 wilayah administrasi, dengan sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kabupaten/kota yang tercatat dalam data resmi dan memiliki laporan keuangan yang diterbitkan dalam periode tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan literatur yang relevan dari

sumber resmi pemerintah. Variabel penelitian terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan pendapatan regional dari berbagai sumber lokal seperti pajak dan retribusi; Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan dana dari pemerintah pusat untuk menyeimbangkan keuangan antar-daerah; Dana Alokasi Khusus (DAK), yang ditujukan untuk pembiayaan sektor tertentu; serta Belanja Modal, yang menggambarkan pengeluaran daerah untuk investasi jangka panjang.

Metode analisis data dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi variabel, serta uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, guna memastikan model regresi memenuhi persyaratan statistik yang tepat. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang didukung oleh uji F untuk menilai pengaruh simultan variabel independen, uji koefisien determinasi untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen, serta uji T untuk mengevaluasi pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini menguraikan tahapan dan pengolahan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang kemudian dikaji pengaruhnya terhadap belanja modal. Penelitian ini mencakup seluruh 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengkaji total 140 observasi yang mencakup periode 2020 hingga 2023, dengan distribusi tahunan sebanyak 35 sampel. Pemilihan sampel akhir yang memenuhi kriteria penelitian dirinci secara sistematis dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Populasi: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	35
2.	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak tercatat dalam data djpk.kemenkeu	(0)
3.	Kabupaten/Kota yang tidak mengeluarkan laporan APBD dan TKDD tahun anggaran 2020-2023	(0)
	Total sampel selama satu tahun	35
	Total sampel selama empat tahun (4x35)	140
	Jumlah sampel yang dapat diolah	140

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
PAD	140	219539400332	2835150144867	467057622409,82	365841154894,667
DAU	140	409629499000	1352878223000	914635023651,45	234294055414,408
DAK	140	72134446768	673879722759	353859109653,91	126525868285,365
BM	140	75192210131	1089358396203	292990724101,00	153287322264,252

Sumber: Olahan Hasil Output SPSS 26, 2025

Hasil analisis terhadap PAD menunjukkan nilai minimum sebesar 219.539.400.332 oleh Kota Salatiga, nilai maximum sebesar 2.835.150.144.867 oleh Kota Semarang, nilai mean 467.057.622.409,82 dan standar deviasi sebesar 365.841.154.894,667. Standar deviasi yang lebih rendah dari nilai mean menunjukkan bahwa distribusi PAD antar daerah relatif merata, tidak terlalu bervariasi secara ekstrem, dan kemungkinan besar tidak banyak daerah yang memiliki PAD jauh di atas atau di bawah rata-rata.

Hasil analisis terhadap DAU menunjukkan nilai minimum sebesar 409.629.499.000 oleh Kota Magelang, nilai maximum sebesar 1.352.878.223.000 oleh Kabupaten Banyumas, nilai mean 914.635.023.651,45 dan standar deviasi 2.342.994.055.414,408. Standar deviasi lebih tinggi disbanding nilai mean menunjukkan bahwa alokasi DAU antar daerah sangat bervariasi.

Hasil analisis terhadap DAK menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 72.134.446.768 oleh Kota Salatiga, nilai maximum sebesar 673.879.722.759 oleh Kabupaten Cilacap, nilai mean 353.859.109.653,91 dan standar deviasi 126.525.868.285,365. Standar deviasi yang lebih rendah dari nilai mean menunjukkan bahwa distribusi DAK antar daerah relatif stabil, dengan variasi yang tidak terlalu besar, dan sebagian besar nilai DAK berada di sekitar rata-rata.

Hasil analisis terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 75.192.210.131 oleh Kota Salatiga, nilai maximum sebesar 1.089.358.396.203 oleh Kota Semarang, nilai mean 292.990.724.101,00 dan standar deviasi 153.287.322.264,252. Standar deviasi yang lebih rendah dari nilai mean menunjukkan bahwa distribusi belanja modal antar daerah relatif stabil, dengan variasi yang tidak terlalu besar, dan sebagian besar nilai belanja modal berada di sekitar rata-rata.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Penelitian ini untuk menguji normalitas menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem) yaitu apabila jumlah sampel lebih dari 30 dapat dikatakan terdistribusi normal. Dalam penelitian ini hasil uji normalitas diperoleh 140 sampel, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD	0,857	1,167	Bebas dari Multikolinearitas
DAU	0,233	4,300	Bebas dari Multikolinearitas
DAK	0,250	3,994	Bebas dari Multikolinearitas

Sumber: Olahan Hasil Output SPSS 26, 2025

Hasil output SPSS tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai $VIF \leq 10$ dan toleransi $\geq 0,10$. Hal ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Sig.	Keterangan
PAD	0,322	Tidak ada heteroskedastisitas
DAU	0,283	Tidak ada heteroskedastisitas
DAK	0,615	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Olahan Hasil *Output* SPSS 26, 2025

Tabel 4 diatas menunjukkan hasil output SPSS bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, PAD $0,322 > 0,05$, DAU $0,283 > 0,05$ dan DAK sebesar $0,615 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	Keterangan
1	81300327756,77630	1,516	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Olahan Hasil *Output* SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 5 hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,516. Berdasarkan teori dari Singgih Santoso apabila nilai DW diantara -2 sampai +2 ($-2 < 1,516 < 2$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Linier Berganda

Variabel	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	t	sig
1 (Constant)	20914770578,546	28930438033,881	0,723	0,471
PAD	,300	,020	14,732	0,000
DAU	-,017	,061	-0,281	0,779
DAK	,417	,109	3,831	0,000

Sumber: Olahan Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 6 diatas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda berikut ini:

$$BM = 20.914.770.578,546 + 0,300 PAD - 0,017 DAU + 0,417 DAK + e$$

Nilai konstanta sebesar 20.914.770.578,546 memberikan arah positif, jadi apabila PAD, DAU, dan DAK sama dengan nol atau konstan maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 20.914.770.578,546.

Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah menyatakan arah positif yang artinya bahwa setiap peningkatan variabel PAD akan berpotensi meningkatkan Belanja Modal dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum menyatakan arah negatif yang artinya bahwa setiap peningkatan variabel DAU akan berpotensi menurunkan Belanja Modal dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus menyatakan arah positif yang artinya bahwa setiap peningkatan variabel DAK akan berpotensi meningkatkan Belanja Modal dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Uji Simultan (F)

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	119,377	,000b

Sumber: Olahan Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 7 hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hasil output SPSS diatas menunjukkan bahwa nilai variabel PAD (X1), DAU (X2), dan DAK (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal (Y). Hal ini berarti bahwa model penelitian layak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji R^2

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.851a	0,725	0,719	81300327756,77630

Sumber: Olahan Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 8 hasil uji pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal sebesar 0,719 = 71,9% sedangkan sisanya 28,1% (100% -71,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (T)

Tabel 9. Hasil uji T

Variabel	t	Sig.	Keterangan
PAD	14,732	0,000	H1 Diterima
DAU	-0,281	0,779	H2 Ditolak
DAK	3,831	0,000	H3 Diterima

Sumber: Olahan Hasil Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 9, variabel PAD memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan t hitung sebesar 14,732, lebih besar dari ttabel (1,97756), sehingga PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (H1 diterima). Sementara itu, variabel DAU menunjukkan nilai signifikansi 0,779 dengan thitung sebesar -0,281, lebih kecil dari ttabel (1,97756), sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (H2 ditolak). Sedangkan variabel DAK memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan thitung sebesar 3,831, lebih besar dari ttabel (1,97756), sehingga DAK berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal (H3 diterima).

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis H_1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh parsial terhadap belanja modal. Hal ini didukung oleh nilai t hitung (14,732) yang melampaui nilai t tabel kritis (1,97756) dan tingkat signifikansi 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hasil ini memperkuat penerimaan H_1 yang menyiratkan bahwa peningkatan PAD berkontribusi pada peningkatan belanja modal. Fenomena ini dikaitkan dengan peran PAD sebagai sumber keuangan fundamental yang dihasilkan dari pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah, yang dialokasikan untuk fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Putri dkk. (2021), memaksimalkan pengumpulan pendapatan dapat meningkatkan perolehan aset, sehingga memfasilitasi perluasan infrastruktur dan memastikan keberhasilan inisiatif pembangunan melalui peningkatan alokasi belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Priyono & Khotimah (2023), Indriyani & Adi (2020), Ardianto & Nursiam (2020), dan

Nuri Engyilia et al. (2023) yang semuanya menegaskan adanya hubungan positif antara PAD dengan belanja modal. Sebaliknya, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani et al. (2021) dan Simbolon et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa PAD tidak berdampak signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis H_2 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (-0,281) yang berada di bawah nilai ambang t tabel (1,97756) dan tingkat signifikansi sebesar 0,779 yang melebihi kriteria 0,05. Oleh karena itu, H_2 ditolak. Dampak yang ditimbulkan tidak maksimal karena besaran DAU yang terbatas sehingga tidak cukup untuk membiayai belanja modal secara substansial. Akibatnya, investasi modal menjadi stagnan ketika alokasi DAU terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa DAU lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, seperti gaji pegawai negeri sipil, daripada dimanfaatkan secara luas untuk peningkatan pelayanan publik melalui penanaman modal. Alokasi DAU terutama ditujukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah, sehingga tercipta keseimbangan keuangan dalam konteks desentralisasi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rosmayanti dkk. (2023), Nadeak & Sari (2021), dan Simbolon dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Marliana dkk. (2022), Indriyani & Adi (2020), dan Ardianto & Nursiam (2020) yang menemukan hubungan signifikan antara DAU dengan belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil uji hipotesis H_3 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berdasarkan nilai t hitung (3,831) yang melebihi nilai t tabel kritis (1,97756) dan tingkat signifikansi 0,000 yang mendukung diterimanya H_3 . Peningkatan DAK berkorelasi dengan peningkatan belanja modal karena dana tersebut disalurkan melalui APBN oleh pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan infrastruktur daerah, sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional. Alokasi DAK memungkinkan peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan layanan publik yang esensial dengan menambah belanja modal. Dengan memanfaatkan DAK, pemerintah daerah dapat meringankan beban keuangan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk proyek pembangunan (Nadeak & Sari, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simbolon et al. (2020), Rosmayanti et al. (2023), Marliana et al. (2022), dan Priyono & Khotimah (2023), yang semuanya melaporkan dampak signifikan DAK terhadap belanja modal. Namun, hal ini berbeda dengan temuan Ardianto & Nursiam (2020), Diputra & Idayati (2023), Nuri Engyilia et al. (2023), dan Ah-mad & Sugiyanto (2022), yang berpendapat bahwa DAK tidak memengaruhi belanja modal secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2023, diperoleh kesimpulan bahwa PAD dan DAK berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh. Artinya, semakin tinggi PAD dan DAK yang diterima daerah, maka belanja modal cenderung meningkat, sementara peningkatan DAU tidak secara langsung meningkatkan belanja modal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain hanya menggunakan data sekunder dari situs DJPK Kemenkeu tanpa observasi langsung, sehingga kurang menangkap dinamika di lapangan. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup tiga variabel bebas tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin berpengaruh, seperti Dana Bagi Hasil. Periode pengamatan yang terbatas pada 2020-2023 juga menjadi keterbatasan, sehingga hasil penelitian ini belum sepenuhnya dapat digeneralisasikan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan observasi langsung guna meningkatkan akurasi temuan. Selain itu, cakupan penelitian dapat diperluas dengan menambahkan variabel lain seperti Dana Bagi Hasil dan memperluas objek penelitian ke daerah lain. Pembaruan periode pengamatan juga diperlukan agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat merepresentasikan tren jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriezal, W. A. D., & Mildawati, T. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA Terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(4), 1–17. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/>
- Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2019). Metode-Penelitian-Bisnis-Kuantitatif-Dan-Kualitatif. In *CV. Noah Aletheia* (Vol. 1, Issue 1).
- Ahmad, D., & Sugiyanto, E. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)*. <https://eprints.ums.ac.id/>
- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Sesila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- Ardiansyah, A., & Arifin, A. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota / Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2017-2019*. <https://eprints.ums.ac.id/>

- Ardianto, J. F., & Nursiam. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018)*. 53(9), 1689–1699. <http://eprints.ums.ac.id/>
- Aulia Devi, A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 1104–1126. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778>
- Diputra, D., & Idayati, F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5185>
- Hadi, I., Khotimah, H., Efektivitas, R., Efisiensi, R., & Kemandirian, R. (2022). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Pulau Jawa Dan Sumatera. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 213–222. <https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1409>
- Indriyani, & Adi, S. W. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal*. 261–270.
- Jensen, M. C & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm : Managerial Behavior. Agency Coast and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics. The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Marliana, R., Prasetyo, A., & Yulianto, P. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA TAHUN 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>

- Nadeak, T., & Sari, L. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021. *Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian (KNPP)*, 1–45.
- Nasution, S. A., Valentin, P. M., Sarumaha, A., Manurung, A., & Munawarah, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Owner*, 7(3), 1841–1852. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1628>
- Nuri Engyilia, P., Darmanto, & Kristiyanti, L. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 296–306. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.42>
- Priyono, I. A., & Khotimah, H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2019-2021. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(2), 235–245. https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/download/1802/07_1802
- Putri, A. S., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.10985>
- Rahmitasari, A. N., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variable Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(8), 1–23.
- Rifai, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *E Jurnal Katalogis*, 5(7), 169–180.
- Rosmayanti, Haliah, H., & Kusumawati, A. (2023). Pengaruh Pendapatam Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 42–51.
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau

dan Bengkulu periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>

Styaningrum, R., & Nursiam. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2017)*. <https://eprints.ums.ac.id/>

Syukri, M., Alhudhori, M., & Adisetiawan, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 340. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.404>

Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>

Trisnani, S. A., & Isthika, W. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 11(1), 26. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1.26-36>

Ursilla Lubis, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2143–2171.

Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(1), 27–36. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6609>

Widianto, A. (2020). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. *Accounting Analysis Journal*, 1–126.

Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal*. June, 693–701. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>

Zelmiyanti, R. (2016). Riri Zelmiyanti. *Teori, Pendekatan Pada, Keagenan Keuangan, Kinerja Dan, Daerah Studi, Modal Provinsi, Pada Indonesia*, 7(1), 11–21.